

EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN KAS PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO*EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF THE CASH ON CONTROL SYSTEM AT MANADO CITY REVENUE OFFICE*

Oleh:

**Ivo Velni Elnazany Sumual¹
Sifrid Pangemanan²**Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail:

¹elnazanyivo@yahoo.com²Sifridp_s@unsrat.ac.id

Abstrak : Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk pengamanan aset pemerintah, mulai dari perencanaan, perolehan dan pemakaian aset agar tidak adanya penyelewengan. Kas merupakan komponen aset penting dalam kelancaran jalannya kegiatan operasional. Karena sifat kas yang likuid, maka kas mudah digelapkan sehingga diperlukan pengendalian intern terhadap kas. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian kas pada dinas pendapatan kota Manado sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008 dan surat edaran direktur jenderal BAKD No 900/316/BAKD. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pada dinas pendapatan kota Manado telah sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008 dan telah sesuai dengan surat direktur jenderal BAKD no.900/316/BAKD dan diharapkan adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Kata kunci : sistem pengendalian intern pemerintah, kas.

Abstract : Application of the internal control system of government aimed at securing government assets, ranging from planning, acquisition and use of the asset so that the absence of fraud. Cash is an important asset component in the smooth course of operations. Because of the nature of cash likuit, then the young embezzled cash so that the necessary internal controls to cash. The purpose of this study to evaluate the cash control system implementation in Manado city revenue office pursuant to regulation no. 60 of 2008 and the circular of the director general of BAKD number 900/316/BAKD. The analytical method used this research is descriptive analysis method. Research shows that the implementation of the internal control system of government in the department of revenue of Manado in accordance with government regulation no. 60 of 2008 and in accordance with the letter of the director general of BAKD no. 900/316/BAKD and expected an increase in service to the community.

Keyword : internal control system of government, cash.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Amanat yang tertuang dalam paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya, keseriusan jajaran pemerintah sangat diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah.

Pembentukan paket perundang-undangan bertujuan agar setiap lembaga pemerintah mampu mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset bisa didapat melalui pembelian, transfer masuk, barang hasil sitaan, dan hibah. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan fondasi yang kokoh, dimana setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi (lingkungan pengendalian) yang mendorong perilaku positif dalam manajemen yang sehat.

Penerapan sebuah sistem akuntansi dalam lembaga pemerintahan dapat mengoptimalkan biaya operasional yang dikeluarkan dan dapat mengefektifkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Salah satu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga pemerintahan adalah sistem pengeluaran kas. Sistem ini menangani pengeluaran kas yang terjadi secara rutin pada sebuah lembaga pemerintahan. Penerapan sistem pengeluaran kas pada lembaga pemerintahan sangatlah penting, mengingat kas adalah aset yang mudah berubah dibandingkan dengan aset lain, sehingga kas merupakan alat pembayaran yang bebas dan selalu siap sedia untuk digunakan.

Kas dilihat dari sifatnya merupakan aset yang paling lancar dan hampir setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas merupakan komponen penting dalam kelancaran jalannya kegiatan operasional. Karena sifat kas yang likuid, maka kas mudah digelapkan sehingga diperlukan pengendalian intern terhadap kas dengan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan. Selain itu juga diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi-fungsi pengeluaran kas. Tanpa adanya pengendalian intern akan mudah terjadi penggelapan uang kas.

Pengendalian intern yang baik dapat tercipta dengan pemerintah harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan padanya. Apabila perumusan tanggung jawab tidak jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Untuk mengawasi pengeluaran kas, maka diperlukan pengendalian intern yang baik terhadap kas yang memerlukan prosedur-prosedur yang memadai untuk melindungi pengeluaran kas. Berdasarkan hal tersebut tentunya dapat memberikan gambaran yang semakin jelas, bahwa sistem pengendalian intern pengeluaran kas tidak bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dalam bentuk tindakan dan kegiatan. Selain itu tentunya harus dilaksanakan oleh semua anggota organisasi tidak terkecuali pimpinan maupun staf/pegawai.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian : untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian kas pada dinas pendapatan kota Manado sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008 dan surat edaran direktur jendral BAKD no 900/316/BAKD.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi

Warren *et.al* (2011:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi dari sebuah bisnis. Ronald *et al* (2010:10) menyatakan bahwa akuntansi adalah teknik, praktek, seni atau kerajinan yang dikembangkan untuk dapat memantau transaksi ekonomi yang terjadi. Dapat didefinisikan akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Sistem

Mulyadi (2013:5) menyatakan “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Gaol (2008), menyatakan bahwa sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila satu unit macet/ terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Dapat didefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian – kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Sistem Pengendalian

Hall (2007) menyatakan definisi dari sebuah system adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau sub sistem yang salingberhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama.

Pengendalian Intern dan Sistem Pengendalian Intern

Hurt (2013:44), menyatakan Pengendalian Intern menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Komponen pengendalian intern menurut COSO antara lain : (1) lingkungan pengendalian; (2) aktifitas pengendalian; (3) informasi dan komunikasi; (4) pemantauan. Arens *et al* (2008) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak terhadap manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Pengertian Kas

Hongren (2008:60) menyatakan *The Cash Account is a record of the cash effects of transactions. Cash includes money, such as a bank balance, paper currency, coins, and checks.*

Penerimaan Kas

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain diperoleh dari transaksi: (A) Pajak Daerah; (B) Retribusi Daerah; (C) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah antara lain meliputi penjualan asset daerah yang dipisahkan, penerimaan bunga deposito, penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Pengeluaran Kas

Sulistiyowati dan Purwanugraha 2012:108 menyatakan pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

Penelitian Terdahulu

Wowor (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Kas Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan aset daerah (DPPKAD) Kota Tomohon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem pengendalian kas masuk dan kas keluar pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian kas yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Tomohon sudah cukup baik namun terkadang sering kali muncul kelemahan-kelemahan dalam pengendalian tersebut.

Riandari (2013) melakukan penelitian dengan judul analisis sistem pengendalian intern pengeluaran kas di biro keuangan sekretariat Negara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa system pengendalian intern pengeluaran kas yang diterapkan cukup efektif walau masih ada beberapa kelemahan.

Kaligis (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis penerapan sistem pengendalian intern kas pada dinas pendapatan Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem pengendalian intern kas masuk dan kas keluar Dinas Pendapatan daerah Kota Bitung. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian intern terhadap kas pada Dinas Pendapatan Kota Bitung telah efektif dan memadai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian kualitatif. Moleong (2010:6) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memberikan hasil yang tepat dan akurat. Berikut ini adalah prosedur penelitian yang akan diterapkan oleh penulis:

1. Studi awal, merupakan langkah pertama yang akan dilakukan dalam rangka menemukan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini.
2. Tahap perencanaan, merupakan proses pemilihan kegiatan dan keputusan selanjutnya mengenai kapan, apa, dan bagaimana proses penelitian yang akan dilakukan.
3. Mempertajam fokus dan perumusan masalah penelitian, merupakan langkah yang penting bagi penulis dalam proses penelitiannya. Karena dalam tahapan ini peneliti dituntut untuk benar-benar mengerti, menguasai, dan memahami akan masalah, metode, dan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.
4. Pelaksanaan, merupakan proses untuk mengobservasi, meneliti dokumen, dan melakukan wawancara terhadap objek yang akan diteliti.
5. Analisis, merupakan kajian yang dilakukan untuk meneliti struktur, faktor-faktor, dari penelitian tersebut.
6. Pengecekan Keabsahan Data, langkah ini sangat penting agar hasil dari penelitian dapat teruji dan dipercaya sehingga bisa digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari penelitian tersebut.
7. Temuan, merupakan hasil dari suatu penelitian.
8. Simpulan Hasil Penelitian, merupakan penggambaran secara menyeluruh tentang hasil dari suatu penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Data merupakan keterangan atau sumber mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh dari wawancara atau tanya jawab dengan anggota perusahaan yang terkait yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan yang berguna dalam penelitian, dan data ini tidak disajikan dalam bentuk angka-angka melainkan disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian (Nusa, 2011:16)

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang bersumber dari data keuangan dan laporan-laporan yang disajikan dalam bentuk angka-angka (Nusa 2011:17)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Kota Manado.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung dan diolah peneliti, yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap bagian unit kerja pada perusahaan (Sugiyono 2011:8)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan, berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan-laporan, hasil-hasil penelitian, dan berbagai publikasi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat (Sugiyono,2011:8)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari Dinas Pendapatan Kota Manado, yang didapat dari hasil wawancara dan informasi lain yang berkaitan dalam penelitian ini, dan data sekunder dari lembaga pengumpul data dan kepustakaan terutama data kualitatif.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti
2. Wawancara langsung (*face to face*)
3. Dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan bagan alir. Sugiyono (2011:21) menjelaskan Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Krismiaji (2010:71) menjelaskan bahwa Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek system informasi secara jelas, tepat dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian symbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah system.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Kota Manado sebagai bagian dari Pemerintah Kota Manado dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Manado. Memiliki visi :

“MODERNISASI DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH” dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan.
3. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak kepada daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian operasional

Hasil Penelitian

Proses akuntansi sektor public terdiri dari identifikasi, pencatatan, Komunikasi dan Pelaporan. Penerapan Sistem Pengendalian Kas berkaitan dengan proses akuntansi sektor public tak terkecuali Dinas Pendapatan Kota Manado. Prosedur Penerimaan Kas dalam perusahaan perlu dirancang sedemikian rupa

sehingga kemungkinan tidak tercatat dan tidak diterimanya uang yang seharusnya diterima dapat dikurangi menjadi sekecil mungkin.

Sistem dan Prosedur Penerimaan

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut.

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

- a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 bulan, bendahara penerimaan wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD.
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara dan diadakan berita acara serah terima.
- c. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Sistem dan Prosedur Pengeluaran

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen.
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Surat Permintaan Pembayaran diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD yang telah dikeluarkan.
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
Proses Penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.
5. Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pembahasan

Penelitian ini menganalisis Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Surat Edaran Direktur Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) No. 900/316/BAKD tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga dapat dianalisis kesesuaian penerapan sistem pengendalian kas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Manado.

Sistem pengendalian kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pendapatan Kota Manado telah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, hal ini terlihat dari pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan SKPD yang telah sesuai dengan Surat Edaran BAKD 900/316/BAKD. Dimana dalam menjalankan tanggung jawab, setiap pegawai memiliki tugas dan fungsi yang jelas sesuai dengan bidang ilmu yang mereka tekuni. Dan dalam mempertanggung jawabkan hasil kerjanya, terdapat auditor yang melakukan pengujian tentang apa yang dilakukan oleh setiap pegawai dalam suatu periode tertentu yakni audit laporan keuangan dan audit kinerja, kemudian diterapkannya sistem

pengarsipan yang baik terhadap dokumen-dokumen transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas, untuk mencegah terjadinya kecacauan dan kekeliruan pencatatan. Disimpannya kas dalam akun bank merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengendalikan kas, sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008, yaitu antara lain:

a. Pengendalian internal atas Penerimaan Kas

Semua penerimaan kas yang terjadi, baik dari Pajak atau Retribusi disimpan di bank pada hari kerja di hari yang sama ketika pajak atau retribusi diterima bendahara penerimaan. Penerimaan Pajak dan Retribusi dengan melalui Bendahara Penerimaan diverifikasi apakah sudah sesuai SKP/SKR Daerah, apabila telah sesuai penerimaan disetor ke bank pada hari yang sama.

b. Pengendalian intern atas Pengeluaran Kas

Dalam sistem pengendalian internal pengeluaran kas semua harus berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dimana semua program pengeluaran dinas tertera dengan jelas. Semua pengeluaran kas yang terjadi di Dinas harus berdasarkan DPA. Setelah DPA disetujui maka dibuat SPD (Surat Penyediaan Dana) untuk meminta penyediaan dana dari BUD, setelah SPD disetujui kemudian diajukanlah SPP (Surat Perintah Pembayaran) sesuai dengan kebutuhan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS untuk Gaji dan Tunjangan. Apabila berkas-berkas SPP telah disetujui diajukan SPM (Surat Perintah Membayar). SPM memiliki 3 jenis yaitu: SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS Gaji dan Tunjangan. Setelah meneliti kelengkapan SPM tersebut Kuasa BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang terdiri dari SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU, SP2D-LS Gaji dan Tunjangan serta SP2D-LS untuk barang dan jasa. Dari SP2D tersebut dilakukanlah pencairan dana di bank yang telah ditunjuk. Kemudian dari pengeluaran kas tersebut dipertanggungjawabkan melalui SPJ (Surat Pertanggungjawaban).

Dinas Pendapatan Kota Manado juga melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam unsur-unsur SPIP, yaitu Unsur lingkungan pengendalian dilaksanakan dengan cara pemisahan tanggung jawab kerja. Masing – masing pegawai melaksanakan tanggung jawab kerja sesuai dengan tupoksinya. Tidak ada pegawai yang melakukan rangkap jabatan. Sehingga resiko penyelewengan terminimalisir. Penilaian resiko telah dilakukan dengan ditetapkannya tujuan dinas serta tujuan tiap kegiatan yang dilakukan oleh dinas. Kegiatan pengendalian dilakukan dengan penetapan prosedur pengelolaan keuangan yang telah dilakukan sesuai dengan Surat Edaran 900/316/BAKD. Keterbukaan informasi dan komunikasi telah dilaksanakan dengan baik, dimana prosedur pengelolaan keuangan dinas telah transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari flowchat system dan prosedur pengelolaan keuangan dinas yang telah sesuai dengan Surat Edaran BAKD 900/316/BAKD.

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado telah mengikuti peraturan yang ada seperti PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan SE.900/316/BAKD tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah. Dan dinilai telah cukup baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Manado telah sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 dan telah sesuai dengan Surat Direktur Jendral BAKD No.900/316/BAKD.

Saran

Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Kota Manado Sebaiknya meningkatkan pelayanannya dalam pemberian informasi dan data-data yang dibutuhkan pengguna
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan keuangan daerah khususnya Penerapan sistem pengendalian Kas.
3. Dalam penelitian ini yang diteliti hanya terbatas Sistem Pengendalian Kas. Sedangkan masih ada faktor-faktor lain yang belum diungkap dalam penelitian ini, semoga pada penelitian selanjutnya dapat membahas faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. et al. 2008. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Terjemahan oleh Amir Abadi Yusuf. Buku Dua. Edisi Indonesia, Jakarta.
- Gaol, Jimmy. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Grasindo, Jakarta.
- Hall, James. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi 2 Edisi Empat*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Hongren, Harrison, 2008, *Accounting*. Pearson International Edition. Upper Saddle River. New Jersey.
- Hurt, Robert L. 2013, *Accounting Information System*. Third Edition. McGraw-Hill. New York.
- Kaligis, 2015. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal EMBA, Vol 15 No.04 Tahun 2015
- Krismiaji (2010). *Sistem Informasi Akuntansi edisi ketiga*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Mahsun, Moh., Sulistiyowati, Firma, dan Purwanugraha, H, A., 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Penerbit BPFE : Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Pendekatan Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. 2010. *Sistem akuntansi edisi tiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riandari, 2013. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas di Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretarian Negara Republik Indonesia*. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. <http://eprints.undiip.ac.id/39369/1/Riandari.pdf> Tanggal akses 9 Januari 2015.
- Ronald Duska, Brenda Shay Duska, Jullie Anne Ragatz, 2011. *Accounting Ethics*. 350 Main Street Malden, USA.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan ketiga belas, Alfabeta, Bandung.
- Warren, Carl S., Reeve, James M., Duchac, Jonathan E. (2011). *Principles of Accounting (24th edition)*. South Western: Cengage Learning.
- Wowor Sendytha Eunike, 2015. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA, Vol.3 No.1 Maret 2015.